

Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2022

Jenita Sinaga*, Rico Wijaya Z, Riski Hernando

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

*Correspondence: jenitasinaga11@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sepanjang periode 2020-2022 yang diukur menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, serta Rasio Efisiensi Belanja. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif dengan pemakaian data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah diaudit. Hasilnya memperlihatkan pola kinerja keuangan yang beragam: mayoritas pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai Derajat Desentralisasi yang Sangat Kurang, Kemandirian Keuangan Daerah cenderung Rendah Sekali dengan pola hubungan instruktif, Ketergantungan Keuangan Daerah umumnya tinggi, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah mayoritas Sangat Efektif dengan distribusi yang beragam, dan Efisiensi Belanja umumnya tergolong Efisien.

Kata kunci : Analisis Rasio Keuangan; Kinerja Keuangan Daerah

Abstract. This study aims to evaluate the financial performance of district/city governments in the province of Jambi during the period of 2020-2022, measured using the Degree of Decentralization Ratio, Local Financial Dependency Ratio, Local Financial Independence Ratio, Local Own Revenue Effectiveness Ratio, and Expenditure Efficiency Ratio. This research is a descriptive quantitative study that utilizes secondary data from audited Local Government Budget Realization Reports. The results show diverse patterns of financial performance: the majority of district/city governments have a Very Low Degree of Decentralization, Local Financial Independence tends to be Extremely Low with an instructive relationship pattern, Local Financial Dependency is generally high, Local Own Revenue Effectiveness is mostly Very Effective with diverse distributions, and Expenditure Efficiency is generally categorized as Efficient.

Keywords : Financial Ratio Analysis; Regional Financial Performance

PENDAHULUAN

Penetapan UU No. 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah menjadi landasan hukum bagi perkembangan otonomi daerah di Indonesia serta satu di antara kebijakan Pemerintah Indonesia yang memposisikan daerah pada fokus pembangunan. Pemerintah daerah (Pemda) diberi kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri lewat diterapkannya otonomi daerah. Evaluasi kinerja Keuangan (Pemda) menjadi krusial sekali sebab Pemda mempunyai tanggung jawab besar terkait pengelolaan pengeluaran, pendapatan, pembangunan infrastruktur serta pelayanan kepada masyarakat.

Kinerja keuangan mencerminkan kemahiran suatu pemerintah daerah perihal mengelola secara menyeluruh sumber daya keuangannya sendiri guna mencapai keperluan lokalnya. Kinerja keuangan yang optimal tercermin dari efektivitas Pemda dalam memanfaatkan secara maksimal potensi lokal,

kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dominan untuk mendukung pembangunan lokal, serta rendahnya tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat (Zulkarnain, 2020). Namun, hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan pada 503 Pemerintah Daerah tahun 2020 memperlihatkan fakta yang berbeda. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menegaskan terkait perihal tidak adanya satupun Pemda yang mampu meraih Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) "Sangat Mandiri". Mayoritas Pemda dikategorikan sebagai "Belum Mandiri", yakni 443 Pemda (88,07%).

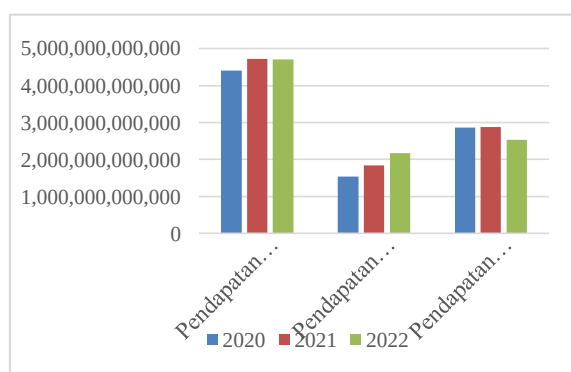
Menkeu Sri Mulyani memberikan informasi perihal ketergantungan daerah pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang masih tinggi. Secara keseluruhan di tingkat nasional, rerata ketergantungan Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah (APBD) terhadap TKDD meraih 80,1%, sedangkan untuk

kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 12,87% saja (Olivia, 2018).

Provinsi Jambi termasuk daerah yang diberikan otonomi oleh pemerintah pusat, sehingga atas penerimaan kewenangan tersebut pemerintah provinsi serta kabupaten/kota dituntut menghasilkan kinerja positif selama dijalanannya otonomi daerah.

Penerimaan daerah merupakan sumber pembiayaan yang diterima dari kemampuan keuangan daerah dalam bentuk PAD, diperoleh dari APBN ataupun APBD antar daerah dalam bentuk Pendapatan Transfer, dan pemasukan lainnya yang diterima daerah mengacu ketentuan perundang-undangan dalam bentuk lain Pendapatan Yang Sah.

Berikut gambaran realisasi pendapatan daerah, PAD, serta pendapatan transfer Provinsi Jambi periode 2020-2022.



Sumber: LRA Provinsi Jambi

Gambar 1 Realisasi APBD Provinsi Jambi Tahun 2020-2022

Grafik terkait memperlihatkan fluktuasi pada realisasi pendapatan daerah Provinsi Jambi sepanjang periode 2020-2022. Meskipun kenaikan kontribusi PAD terjadi tiap tahunnya, namun mendominasinya pendapatan transfer pada total pendapatan daerah menandakan bahwa kontribusi PAD masih belum optimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Provinsi Jambi belum sepenuhnya memanfaatkan potensi pendapatan lokalnya, sehingga masih kebergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat untuk pemenuhan keperluan daerahnya.

Berlandaskan kajian Zulkarnain (2020) terkait kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat, diketahui bahwasanya ketergantungan secara rasio dikategorikan sebagai rendah. Namun, temuan yang berbeda terungkap dalam penelitian Yanti

dan Silitonga (2022) terkait pemerintah Kota Medan yang memperlihatkan tingkat ketergantungan yang tinggi.

Mengingat relevansi serta pentingnya analisis kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, munculnya kebutuhan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sepanjang periode 2020-2022. Penilaian ini akan memakai beberapa rasio, termasuk Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, serta Efisiensi Belanja.

Tinjauan Pustaka

Pemerintahan Daerah

Mengacu UU No. 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah, “Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Otonomi Daerah

Otonomi daerah pada dasarnya adalah pengalihan wewenang beserta tanggung jawab dari pemerintah pusat pada Pemda. Pemerintah pusat sebelumnya menyelenggarakan program yang seragam pada seluruh wilayah di Indonesia. Namun, hadirnya otonomi daerah memberikan daerah kekuasaan untuk mengatur wilayah mereka secara mandiri, sehingga memberikan fleksibilitas yang lebih besar dan pendekatan yang disesuaikan dengan pemerintahan daerah.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah mencerminkan keandalan suatu daerah untuk mengelola serta mengoptimalkan sumber daya keuangan lokalnya guna mencapai keperluan daerahnya. Ada 3 alasan pentingnya dilaksanakan pengukuran kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yakni membantu Pemda agar mampu memfokuskan diri pada tujuan dan sasaran yang sudah diatur, menjadi sarana Pemda dalam pengalokasian sumber daya dan pemilihan keputusan, dan menjadi wujud akuntabilitas publik serta meningkatkan komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2021).

Analisis Keuangan Daerah

Analisis laporan keuangan merupakan penilaian dan kontras berbagai elemen data yang diuraikan dalam laporan keuangan (Mahmudi, 2019). Pemanfaatan rasio keuangan daerah dapat dijadikan sebagai salah satu metode penilaian dalam mengukur kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Rasio-rasio tersebut yakni Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, serta Rasio Efisiensi Belanja.

Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi menggambarkan keandalan daerah atas upaya menaikkan pendapatan asli daerah, yang merupakan satu di antara aspek krusial dalam implementasi otonomi daerah secara keseluruhan. Tingkat kontribusi pendapatan asli daerah pada total pendapatan daerah tercermin dengan derajat desentralisasi. Kemampuan Pemda dalam meningkatkan desentralisasi selaras pada kontribusi pendapatan asli daerah. Formula dan kriteria penilaian rasio derajat desentralisasi yakni:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 1 Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi

Kemampuan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi (%)
Sangat Kurang	0 - 10
Kurang	10 - 20
Cukup	20 - 30
Sedang	30 - 40
Baik	40 - 50
Sangat Baik	>50

Sumber: Utari, dkk (2023)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah memperlihatkan seberapa baik suatu pemda dalam membiayai sendiri aktivitas pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan

masyarakat dalam kerangka otonomi daerah. Keberhasilan pada kondisi itu bisa tergambarkan lewat kenaikan rasio kemandirian keuangan daerah. Formula dan kriteria penilaian rasio kemandirian keuangan yakni:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 2 Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 - 100	Delegatif

Sumber: Halim (2008)

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Daerah yang sangat ketergantungan pada pendanaan pemerintah pusat dipandang keuangannya tidak mandiri. Tingginya nilai rasio ketergantungan keuangan memperlihatkan

semakin besarnya ketergantungan Pemda terhadap sumber pendanaan eksternal. Formula dan kriteria penilaian rasio ketergantungan keuangan yakni:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3 Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Ketergantungan Daerah	Rasio Ketergantungan Keuangan (%)
Sangat Rendah	0 - 25
Rendah	25 - 50
Sedang	50 - 75
Tinggi	75 - 100

Sumber: Bangga (2017)

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas pelaksanaan anggaran menjadi tolok ukur keberhasilan suatu daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi itu menentukan apakah tujuan yang ditetapkan telah

terlaksana, dan memperlihatkan tingkatan efektivitas yang maksimal atas implementasi tersebut jika tercapai. Rumus dan kriteria penilaian rasio efektivitas pendapatan asli daerah yakni:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4 Kriteria Penilaian Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas PAD	Rasio Efektivitas PAD (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	100
Cukup Efektif	90 - 99
Kurang Efektif	75 - 89
Tidak Efektif	< 75

Sumber: Mahmudi (2019)

Rasio Efisiensi Belanja

Setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah harus dilaksanakan dengan efisiensi. Rasio efisiensi belanja menjadi alat untuk menilai seberapa efisien pengeluaran dalam suatu aktivitas pemerintahan. Jika rasio ini di

bawah 100% memperlihatkan kapabilitas Pemda yang telah mengelola anggaran dengan efisien, sedangkan jika lebih dari 100% menandakan adanya potensi pemborosan anggaran (Mahmudi, 2019). Berikut formula untuk menghitung rasio efisiensi belanja.

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif, yang melibatkan penggunaan rumus-rumus rasio untuk menganalisis kinerja keuangan. Data yang dipakai bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2020-2022 yang telah diaudit, khususnya Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari semua Kabupaten-Kota di Provinsi Jambi.

HASIL

Gambaran Umum Objek Penelitian

Provinsi Jambi terletak di tengah Pulau Sumatera dan menjadi salah satu provinsi di Indonesia. Provinsi Jambi tersusun oleh 9 kabupaten serta 2 kota, dengan total 144 kecamatan dan 1.562 desa/kelurahan. Selain itu posisi Provinsi Jambi juga strategis karena berada dalam kawasan ASEAN dan Interregional Sumatera.

Analisis Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio Derajat Desentralisasi memperlihatkan tingkat kontribusi PAD dalam penyediaan dana pengeluaran ataupun belanja daerahnya.

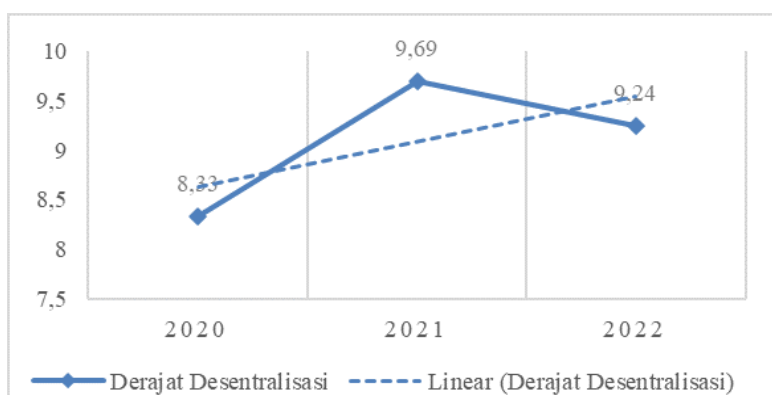
Tabel 5 Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2022

No	Nama Pemda	2020		2021		2022	
		Rasio	Prkt	Rasio	Prkt	Rasio	Prkt
1	Kab. Batanghari	8,70	3	11,04	3	8,46	5
2	Kab. Bungo	9,90	2	15,22	2	11,11	2
3	Kab. Kerinci	6,79	8	5,64	10	3,85	11
4	Kab. Merangin	7,32	5	7,84	7	8,79	4
5	Kab. Muaro Jambi	7,01	7	7,98	5	8,02	6
6	Kab. Sarolangun	6,07	9	5,56	11	5,88	9
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	8,13	4	7,69	8	7,84	7
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	4,72	10	7,02	9	5,24	10
9	Kab. Tebo	7,23	6	7,96	6	7,33	8
10	Kota Jambi	21,93	1	22,11	1	26,19	1
11	Kota Sungai Penuh	3,88	11	8,56	4	8,93	3

Sumber: Data Diolah (2024)

Tabel 5 memperlihatkan Kota Jambi yang konsisten selama tiga tahun (2020-2022) berada di peringkat pertama atas perolehan persentase Rasio Derajat Desentralisasi terbesar. Selain itu sepanjang periode tersebut Kabupaten Bungo turut konsisten meraih peringkat kedua, dan di

peringkat ketiga diraih Kabupaten Batanghari pada tahun 2020-2021 dan Kota Sungai Penuh berhasil menyalib di tahun selanjutnya. Peringkat keempat dan seterusnya cenderung ditempati oleh daerah yang berfluktuasi.



Gambar 2 Grafik Rata-Rata Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2022

Terlihat rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi terbesar terjadi pada tahun 2021. Hal tersebut terjadi karena kenaikan sebesar 1,36% dari tahun sebelumnya. Namun, terjadi

penurunan di tahun berikutnya sejumlah 0,45%, sehingga menjadi 9,24%. Penurunan ini mengindikasikan menurunnya kinerja kabupaten-kota di Provinsi Jambi.

Tabel 6 Pengklasifikasian Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Mengacu Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Tahun 2020-2022

Rasio Derajat Desentralisasi (%)	Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota
0-10	Sangat Kurang	(1) Kab. Batanghari, (2) Kab. Merangin, (3) Kab. Tanjung Jabung Barat, (4) Kab. Muaro Jambi, (5) Kab. Tebo, (6) Kota Sungai Penuh, (7) Kab. Sarolangun, (8) Kab. Tanjung Jabung Timur, (9) Kab. Kerinci
10-20	Kurang	(1) Kab. Bungo
20-30	Cukup	(1) Kota Jambi
30-40	Sedang	-
40-50	Baik	-
>50	Sangat Baik	-

Sumber: Data Diolah (2024)

Berlandaskan tabel 6 diketahui daerah dengan kemampuan keuangan “Cukup” ditempati Kota Jambi. Sebanyak 1 daerah memiliki kemampuan “Kurang” dan 9 daerah dengan kemampuan “Sangat Kurang” atau 81% dari jumlah kabupaten-kota di Provinsi Jambi selama tiga tahun berturut-turut. Penyebab utama rendahnya kemampuan keuangan ini adalah relatif kecilnya sumbangsih PAD pada total pendapatan daerah.

Strategi yang dapat dilakukan terkait kebijakan pengelolaan keuangan daerah guna Pemda mampu mengelola keuangannya secara independen pada konteks otonomi daerah.

menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kedepannya demi kesuksesan program pembangunan daerah meliputi kebijakan yang memfokuskan pada optimalisasi pengelolaan aset daerah dan naiknya pemanfaatan sumber pajak daerah melalui evaluasi ulang regulasi pajak daerah serta kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang meningkat.

Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mencerminkan seberapa baik

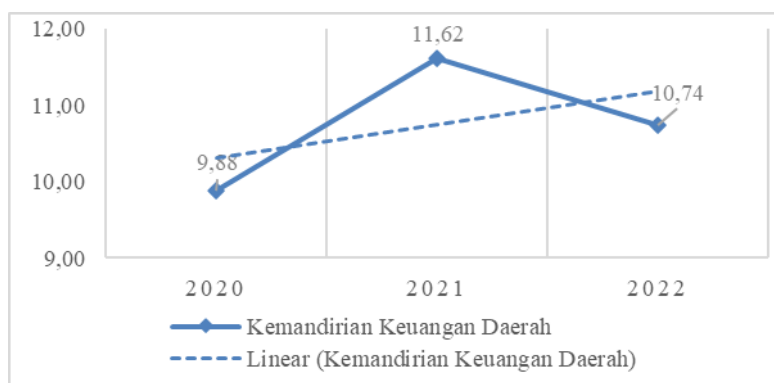
Tabel 7 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2022

No	Nama Pemda	2020		2021		2022	
		Rasio	Prkt	Rasio	Prkt	Rasio	Prkt
1	Kab. Batanghari	9,94	3	12,84	3	9,56	5
2	Kab. Bungo	11,64	2	17,19	2	12,57	2
3	Kab. Kerinci	7,64	8	6,17	10	4,02	11
4	Kab. Merangin	8,27	5	8,88	6	9,65	4
5	Kab. Muaro Jambi	7,89	7	9,02	5	8,72	6
6	Kab. Sarolangun	6,77	9	6,16	11	6,26	9
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	9,20	4	8,62	7	8,50	7
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	5,14	10	7,77	9	5,53	10
9	Kab. Tebo	8,25	6	9,13	4	8,01	8
10	Kota Jambi	29,81	1	31,90	1	35,51	1
11	Kota Sungai Penuh	4,10	11	8,56	8	9,81	3

Sumber: Data Diolah (2024)

Tabel 7 memperlihatkan terkait sebagian besar pemerintah Kabupaten-Kota di Provinsi Jambi menghasilkan persentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang rendah secara konsisten selama 3 tahun berturut-turut.

Peringkat pertama ditempati Kota Jambi atas persentase tertinggi yang dihasilkan selama periode tersebut. Persentase terendah diraih Kabupaten Muaro Jambi di tahun 2022 yang hanya mencapai 4,02%.



Gambar 3 Grafik Rata-Rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2022

Terlihat rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan tertinggi terjadi pada tahun 2021. Hal tersebut terjadi karena kenaikan sebesar 1,74%

dari tahun sebelumnya. Namun, terjadi penurunan di tahun berikutnya sejumlah 0,88%, sehingga menjadi 10,74%. Kondisi ini

menandakan kinerja kabupaten-kota di Provinsi Jambi yang menurun.

Tabel 8 Pengklasifikasian Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Mengacu Skala Interval Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2020-2022

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah	Pola Hubungan	Kabupaten/Kota
0-25	Rendah Sekali	Instruktif	(1) Kab. Bungo, (2) Kab. Batanghari, (3) Kab. Merangin, (4) Kab. Tanjung Jabung Barat, (5) Kab. Muaro Jambi, (6) Kab. Tebo, (7) Kota Sungai Penuh, (8) Kab. Sarolangun, (9) Kab. Tanjung Jabung Timur, (10) Kab. Kerinci
25-50	Rendah	Konsultatif	(1) Kota Jambi
50-75	Sedang	Partisipatif	-
75-100	Tinggi	Delegatif	-

Sumber: Data Diolah (2024)

Berlandaskan tabel 8 diketahui daerah dengan kemampuan keuangan “Sedang” dengan pola hubungan “konsultatif” ditempati Kota Jambi. Sebanyak 10 daerah memiliki kemampuan “Rendah Sekali” dengan pola hubungan “Instruktif” atau 91% dari jumlah kabupaten-kota di Provinsi Jambi selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini mencerminkan kurangnya kemandirian daerah atas aspek finansial dan keterlibatan sumber pendanaan eksternal yang masih besar dalam menjalankan otonomi.

Penyebab utama rendahnya kemampuan keuangan ini adalah sumbangsih dana yang berasal dari eksternal masih sangat tinggi bila dibandingkan dengan dana yang berasal dari daerahnya.

Langkah-langkah yang perlu di ambil Kabupaten-Kota di Provinsi Jambi agar keterlibatan sumber dana oleh pemerintah pusat dan/atau provinsi dapat di minimalisir yakni melalui identifikasi potensi-potensi baru yang dapat menjadi sumber pendapatan, selain itu sumber pendapatan yang sudah dimiliki dapat dikembangkan lebih lanjut.

Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah mencerminkan sebesar apa ketergantungan Pemda pada pendanaan yang berasal dari transfer pemerintah pusat ataupun dari daerah lain.

Tabel 9 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2022

No	Nama Pemda	2020		2021		2022	
		Rasio	Prkt	Rasio	Prkt	Rasio	Prkt
1	Kab. Batanghari	87,58	3	85,98	3	88,54	3
2	Kab. Bungo	85,10	2	88,54	7	88,37	2
3	Kab. Kerinci	88,84	7	91,49	11	95,76	11
4	Kab. Merangin	88,50	6	88,35	5	91,06	4
5	Kab. Muaro Jambi	88,88	8	88,46	6	91,97	7
6	Kab. Sarolangun	89,62	9	90,25	9	93,92	9
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	88,39	5	89,26	8	92,15	8
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	91,77	10	90,28	10	94,76	10
9	Kab. Tebo	87,62	4	87,16	4	91,51	6
10	Kota Jambi	73,56	1	69,30	1	73,76	1
11	Kota Sungai Penuh	91,97	11	85,88	2	91,07	5

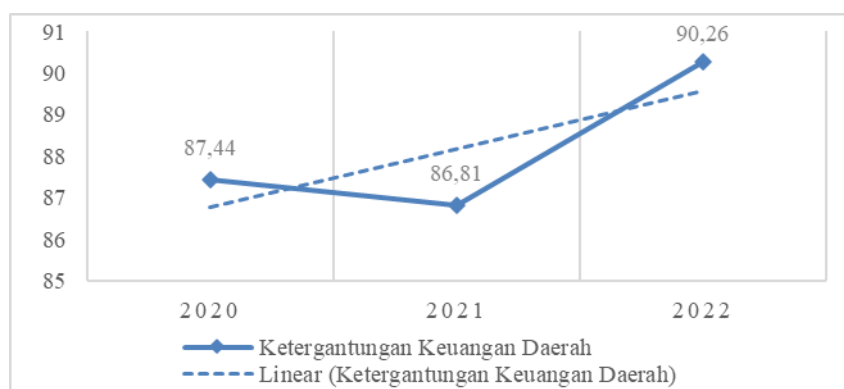
Sumber: Data Diolah (2024)

Tabel 9 memperlihatkan ketergantungan Kota Jambi yang paling baik dan konsisten selama tiga tahun (2020-2022) sehingga

menempatkannya pada peringkat pertama atas perolehan persentase Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terendah. Sepanjang periode

tersebut Kabupaten Batanghari turut konsisten meraih peringkat ketiga, namun di peringkat kedua dan seterusnya terjadi ketidakkonsistenan daerah yang menempati posisi tersebut.

Persentase terburuk (tertinggi) dihasilkan Kabupaten Kerinci yang mencapai ketergantungan sebesar 95,76%.



Gambar 4 Grafik Rata-Rata Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2022

Terlihat rata-rata Rasio Ketergantungan Keuangan terbaik terjadi pada tahun 2021. Hal tersebut terjadi karena penurunan sebesar 0,63% dari tahun sebelumnya. Namun, terjadi kenaikan

di tahun berikutnya yang cukup besar sehingga menjadi 90,26%. Perubahan ini mengindiskan menurunnya kinerja kabupaten-kota di Provinsi Jambi.

Tabel 10 Pengklasifikasian Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Mengacu Skala Interval Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Tahun 2020-2022

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (%)	Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota
0-25	Sangat Rendah	-
25-50	Rendah	-
50-75	Sedang	(1) Kota Jambi
75-100	Tinggi	(1) Kab. Bungo, (2) Kab. Batanghari, (3) Kab. Tebo, (4) Kab. Merangin, (5) Kota Sungai Penuh, (6) Kab. Muaro Jambi, (7) Kab. Tanjung Jabung Barat, (8) Kab. Sarolangun, (9) Kab. Kerinci, (10) Kab. Tanjung Jabung Timur

Sumber: Data Diolah (2024)

Berlandaskan tabel 10 diketahui Kota Jambi dengan kemampuan keuangan “Sedang” dan 10 daerah memiliki kemampuan “Tinggi” atau 91% dari jumlah kabupaten-kota di Provinsi Jambi selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini mencerminkan daerah yang masih memiliki ketergantungan tinggi pada pendanaan yang berasal dari transfer.

Kemampuan keuangan yang rendah ini merupakan akibat optimalisasi yang dilakukan pemerintah masih sangat kurang dalam menurunkan kebergantungan daerahnya.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi harapan yang segera harus dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi dan kedepannya sumber

pendanaan tersebut lebih dapat diunggulkan perihal pemenuhan keperluan daerahnya.

Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan seberapa efektif kemampuan keuangan Pemerintah Daerah perihal pendapatan asli daerah yang terealisasi sudah sesuai dengan targetnya.

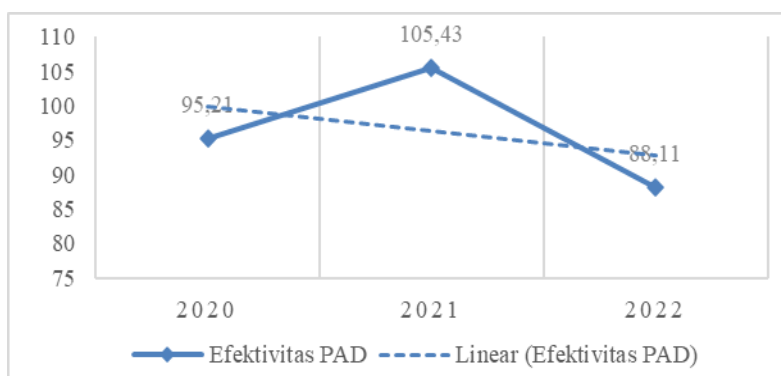
Tabel 11 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2022

No	Nama Pemda	2020		2021		2022	
		Rasio	Prkt	Rasio	Prkt	Rasio	Prkt
1	Kab. Batanghari	75,64	11	107,56	4	67,46	11
2	Kab. Bungo	93,94	8	94,02	9	81,96	9
3	Kab. Kerinci	94,60	7	104,51	6	109,29	1
4	Kab. Merangin	99,91	4	96,96	8	82,97	8
5	Kab. Muaro Jambi	102,65	3	113,80	3	95,72	3
6	Kab. Sarolangun	79,38	10	82,96	11	86,48	7
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	111,70	1	98,40	7	104,68	2
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	89,17	9	146,09	1	89,60	6
9	Kab. Tebo	99,80	5	126,10	2	90,01	5
10	Kota Jambi	96,23	6	84,74	10	91,20	4
11	Kota Sungai Penuh	104,29	2	104,59	5	69,85	10

Sumber: Data Diolah (2024)

Tabel 11 memperlihatkan kecenderungan ketidakonsitenan yang terjadi selama tahun 2020-2022, namun tidak dengan Kabupaten Muaro Jambi berhasil mempertahankan peringkat ketiga setiap tahunnya.

Persentase Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) paling rendah ditempati Kabupaten Batanghari tahun 2020 dan 2022 kemudian Kabupaten Sarolangun tahun 2021.



Gambar 5 Grafik Rata-Rata Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2022

Terlihat rata-rata tertinggi Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terjadi pada tahun 2021. Hal tersebut terjadi akibat peningkatan sebesar 10,22% dari tahun sebelumnya. Namun, di tahun berikutnya terjadi penurunan persentase yang jauh lebih besar

dibandingkan dengan kenaikan sebelumnya yang mencapai 17,32%.

Penurunan ini menandakan pemerintah Kabupaten-Kota di Provinsi Jambi mengalami penurunan kinerjanya.

Tabel 12 Pengklasifikasian Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Mengacu Skala Interval Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020-2022

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (%)	Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota
>100	Sangat Efektif	(1) Kab. Tanjung Jabung Timur, (2) Kab. Tebo, (3) Kab. Tanjung Jabung Barat, (4) Kab. Muaro Jambi, (5) Kab. Kerinci
100	Efektif	-

90-99	Cukup Efektif	(1) Kab. Merangin, (2) Kota Sungai Penuh, (3) Kota Jambi
75-89	Kurang Efektif	(1) Kab. Bungo, (2) Kab. Batanghari, (3) Kab. Sarolangun
<75	Tidak Efektif	-

Sumber: Data Diolah (2024)

Berlandaskan tabel 12 diketahui 5 pemerintah Kabupaten-Kota di Provinsi Jambi berada pada kemampuan keuangan “Sangat Efektif”. Sebanyak 3 daerah memiliki kemampuan “Cukup Efektif” dan 3 daerah lainnya dengan kemampuan “Kurang Efektif”. Hal ini mencerminkan belum berhasilnya Pemda perihal pengoptimalisasi efektivitas PAD yang terealisasi sesuai dengan target.

Kondisi ini disebabkan oleh potensi daerah yang dikelola dengan belum optimal serta penetapan target yang terlalu ambisius. Meskipun beberapa daerah sudah mencapai hasil “Sangat Efektif”, namun setelah ditelusuri ternyata realisasi bantuan yang diterima dalam

bentuk transfer masih sangat tinggi jumlahnya jika dibandingkan target PAD Pemda.

Pemerintah Kabupaten-Kota di Provinsi Jambi kedepannya harus mengimplementasikan strategi untuk meningkatkan efektivitas PAD meliputi pendataan dan evaluasi potensi pajak serta retribusi daerah, sehingga dapat membentuk acuan yang lebih kuat untuk menetapkan target pendapatan yang lebih terfokus.

Analisis Rasio Efisiensi Belanja

Rasio Efisiensi Belanja memberikan informasi seberapa efisien (hemat) Pemda atas anggaran belanja daerahnya.

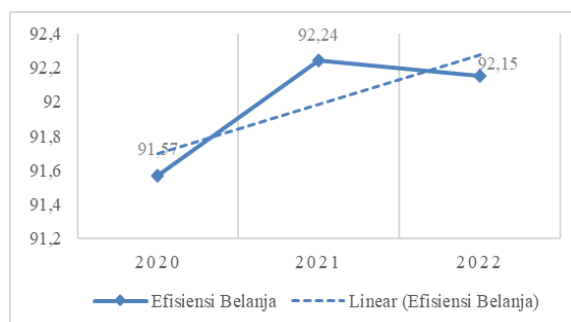
Tabel 13 Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2022

No	Nama Pemda	2020		2021		2022	
		Rasio	Prkt	Rasio	Prkt	Rasio	Prkt
1	Kab. Batanghari	92,99	8	95,60	10	80,23	1
2	Kab. Bungo	78,54	1	87,89	1	82,22	2
3	Kab. Kerinci	94,96	9	93,52	7	94,11	8
4	Kab. Merangin	86,93	2	94,08	9	94,28	9
5	Kab. Muaro Jambi	106,88	11	96,91	11	96,29	10
6	Kab. Sarolangun	91,35	6	89,31	3	90,66	4
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	92,15	7	91,20	5	92,47	6
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	95,45	10	90,58	4	92,86	7
9	Kab. Tebo	88,82	4	93,32	6	91,36	5
10	Kota Jambi	91,19	5	88,72	2	89,51	3
11	Kota Sungai Penuh	88,06	3	93,52	8	109,69	11

Sumber: Data Diolah (2024)

Tabel 13 memperlihatkan Kabupaten Bungo yang menempati peringkat pertama atas perolehan persentase Rasio Efisiensi Belanja paling baik tahun 2020-2021, dan Kabupaten Batanghari mampu menylib di tahun

selanjutnya. Selain itu sepanjang periode tersebut peringkat kedua dan seterusnya cenderung tidak konsisten dan ditempati oleh daerah yang bervariasi.



Gambar 6 Grafik Rata-Rata Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2022

Terlihat rata-rata Rasio Efisiensi Belanja Keuangan selama tiga tahun (2020-2022) kurang dari 100%. Persentase terbesar terjadi pada tahun 2021. Hal tersebut terjadi karena kenaikan sebesar 1,6% dari tahun sebelumnya. Namun,

terjadi penurunan yang relatif kecil di tahun berikutnya sejumlah 0,09%, sehingga menjadi 92,15%. Kondisi ini menandakan kinerja kabupaten-kota di Provinsi Jambi yang menurun tetapi tidak begitu besar.

Tabel 14 Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Mengacu Skala Interval Rasio Efisiensi Belanja Tahun 2020-2022

Rasio Efisiensi Belanja (%)	Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten/Kota
>100	Tidak Efisien	(1) Kab. Muaro Jambi
<100	Efisien	(1) Kab. Bungo, (2) Kab. Batanghari, (3) Kota Jambi, (4) Kab. Sarolangun, (5) Kab. Tebo, (6) Kab. Merangin, (7) Kab. Tanjung Jabung Barat, (8) Kab. Tanjung Jabung Timur, (9) Kab. Kerinci, (10) Kota Sungai Penuh

Sumber: Data Diolah (2024)

Mengacu dalam tabel 14 diketahui sebagian besar Pemda selama tiga tahun berturut-turut berada pada kemampuan keuangan yang “Efisien” yakni 10 daerah dan 1 Pemda lain yakni Kabupaten Muaro Jambi dengan kemampuan “Tidak Efisien”. Hal ini mencerminkan kapasitas pemerintah Kabupaten-Kota di Provinsi Jambi yang dipandang sudah mengelola dengan baik atas penggunaan anggaran belanja daerahnya dan kedepannya mampu mempertahankan kinerjanya.

Namun Kabupaten Muaro Jambi perlu meningkatkan efisiensi pengelolaan belanja daerahnya dengan penggunaan anggaran seminimal mungkin dan mengacu pada kebutuhan daerah serta memberikan prioritas pada pelayanan publik.

SIMPULAN

Mengacu pada hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan berkenaan dengan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2020-2022 yakni:

1. Berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi sebagian besar masuk kategori “Sangat Kurang”, sebab angka rata-rata yang dihasilkan <10%.
2. Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sebagian besar memperoleh angka rata-rata <25%, sehingga dikategorikan “Rendah Sekali” dengan pola hubungan yang “Instruktif”.
3. Berdasarkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah sebagian besar masuk

kategori “Tinggi” dengan perolehan persentase rata-rata berada diatas 75%.

4. Berdasarkan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah mayoritas masuk kategori “Sangat Efektif” dengan perolehan rasio diatas 100% dan berdistribusi seimbang antara Pemda yang “Cukup Efektif” dengan Pemda yang “Kurang Efektif”.
5. Berdasarkan Rasio Efisiensi Belanja sebagian besar masuk kategori “Efisien”, sebab rata-rata yang diperoleh kurang dari 100%.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah.
- Bangga, W. (2017). *Administrasi Keuangan Negara Dan Daerah* . Penerbit Ghalia Indonesia.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Dearah: Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Ketiga). Penerbit Salemba Empat.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi Keempat). Penerbit UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Terbaru). Penerbit Andi.
- Olivia, G. (2018). *Menkeu: Ketergantungan APBD pada Dana Transfer Daerah Sangat Tinggi*. Diakses pada 18 November 2023. <https://nasional.kontan.co.id/news/menkeuketergantungan-apbd-pada-dana-transferdaerah-sangat-tinggi>.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terkait Pemerintahan Daerah.

Utari, R., Nursyabani, A., In, H., & Kurniawan, S. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dilihat Dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Serta Rasio Efektivitas. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen (EKO-BISMA)*, 2(2).

Yanti, P., & Silitonga, A. A. (2022). Analisis Rasio Keuangan APBD Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kota Medan Tahun 2016-2020. *Jurnal Akuntansi Prima*, 4(1), 104–115.

Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat. *CAKRAWALA – Repositori IMW*, 3(1), 61–74.